

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, sebuah proses yang seringkali menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan muncul ketika pelaksanaannya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses implementasi PKH dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis data lapangan melalui kerangka implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program dipengaruhi oleh lingkungan sosial-ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya dukungan kebijakan daerah. Komunikasi antar lembaga pelaksana juga tidak terpadu, yang mengakibatkan informasi simpang siur. Keterbatasan jumlah pendamping sosial secara langsung mengurangi kualitas edukasi bagi penerima, sementara para pelaksana sendiri lebih terfokus pada penyelesaian tugas administratif ketimbang pemberdayaan. Hambatan utama terbagi dua: secara internal, masalah bersumber dari mekanisme pembaruan data yang lambat dan beban administrasi yang tinggi; secara eksternal, tantangan berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program, keterbatasan akses fisik menuju layanan publik bagi kelompok rentan, serta adanya stigma sosial. Untuk itu, disarankan adanya pembaruan data secara berkala, peningkatan kapasitas dan jumlah pendamping, serta penguatan mekanisme koordinasi antar instansi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Sosial, Hambatan Pelaksanaan*

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a primary government instrument in poverty alleviation efforts through conditional cash transfers. However, the program's success is determined by how the policy is carried out on the ground, a process that often faces various challenges. A problem arises as its implementation in Terjun Subdistrict, Medan Marelan District, has not shown the expected results. Therefore, this study aims to describe the PKH implementation process and identify its inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzes field data through the policy implementation framework of Van Meter and Van Horn. The findings show that program execution is affected by an unstable socio-economic environment and a lack of local policy support. Communication among implementing agencies is also unintegrated, leading to confusing information. The limited number of social facilitators directly reduces the quality of education for beneficiaries, while the implementers themselves are more focused on completing administrative tasks than on empowerment. The main barriers are twofold: internally, problems stem from slow data-updating mechanisms and high administrative burdens; externally, challenges arise from low public understanding of the program, physical access limitations to public services for vulnerable groups, and social stigma. Therefore, regular data updates, increasing the capacity and number of facilitators, and strengthening coordination mechanisms among agencies are recommended to ensure the program can be implemented in a more targeted and effective manner.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program, Poverty Alleviation, Social Policy, Implementation Barriers*